



SINERGITAS BISNIS KOPERASI DESA MERAH PUTIH DAN BADAN USAHA MILIK DESA

Sulasi Rongiyati*

Abstrak

Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia sangat bergantung pada penguatan akar ekonomi di tingkat desa, yang diwujudkan melalui pengembangan ekosistem ekonomi desa sebagai agenda strategis nasional. Pemerintah telah meluncurkan kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi desa. KDMP, yang berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Sementara itu, BUMDes berfungsi mengelola aset desa dan mengembangkan potensi lokal secara produktif. Sinergi antara KDMP dan BUMDes menjadi instrumen penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif jangka panjang. Artikel ini menganalisis peran strategis kedua lembaga tersebut serta potensi kolaborasi bisnis untuk memperkuat perekonomian desa secara berkelanjutan. Untuk mengoptimalkan kinerja keduanya dan menghindari tumpang tindih kegiatan, Komisi VI DPR RI perlu mendorong Pemerintah agar keduanya dapat melakukan kerja yang sinergis sehingga tujuan memperkuat perekonomian desa melalui potensi yang dimilikinya dapat terwujud.

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia tidak akan terwujud tanpa penguatan akar ekonomi di tingkat desa. Karenanya penguatan ekosistem ekonomi desa menjadi agenda strategis nasional untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu terobosan yang dilakukan Pemerintah adalah dengan membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai motor penggerak ekonomi berbasis gotong royong dan kekeluargaan.

KDMP menjadi inisiatif kebijakan Presiden Prabowo dengan target membentuk 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia untuk memperkuat perekonomian desa, khususnya meningkatkan ketahanan pangan dan mempercepat pengentasan kemiskinan di pedesaan. Sebelumnya Pemerintah telah menetapkan kebijakan pembentukan BUMDes sebagai institusi bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh desa serta bertujuan untuk mengelola aset desa, mengembangkan potensi lokal, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini sedikitnya sudah terbentuk 64 BUMDes di seluruh Indonesia (Cahyadin, 2025). Baik KDMP maupun BUMDes, keduanya memiliki tujuan untuk memperkuat kemandirian perekonomian desa dengan menggali potensi yang dimiliki desa. Dengan demikian kedua kebijakan ini perlu bersinergi sebagai instrumen pembangunan desa dan pertumbuhan ekonomi inklusif dalam

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: sulasi.rongiyati@dpr.go.id.

jangka panjang. Tulisan ini menganalisis peran strategis KDMP dan BUMDes, serta sinergi bisnis yang dapat dilakukan keduanya untuk mewujudkan serta memperkuat kemandirian perekonomian desa di Indonesia.

Peran Strategis KDMP dan BUMDes dalam Perekonomian Desa

Presiden Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Inpres No. 9 Tahun 2025) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Koperasi No. 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional tanggal 12 Juli 2025 sebanyak 80.000 KDMP akan diresmikan Presiden (Permana, 2025).

Gagasan Koperasi Merah Putih muncul sebagai respons terhadap kebutuhan nyata masyarakat desa untuk memiliki lembaga ekonomi yang mampu memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan warga. Selain itu, koperasi ini juga diharapkan bisa memangkas rantai pasok panjang yang selama ini menjadi kendala distribusi kebutuhan pokok (Fahun, 2025). Pembentukan KDMP didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu (Kopdesmerahputih, 2025). Dengan demikian dalam jangka panjang koperasi ini dimaksudkan untuk meminimalisasi jumlah kemiskinan, melalui upaya meningkatkan ketahanan pangan dan mempercepat pengentasan kemiskinan di pedesaan.

KDMP hadir untuk menjawab tantangan ini dengan membangun sistem ekonomi desa yang tangguh berbasis sumber daya lokal seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan, yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat pedesaan. Sedikitnya terdapat tujuh bidang yang menjadi fokus kegiatan KDMP, sebagaimana disebutkan dalam Inpres No. 9 Tahun 2025, yaitu kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa, pergudangan, dan logistik desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memerhatikan karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang ada di desa/kelurahan.

Dengan keberadaan koperasi di setiap desa, masyarakat akan mudah mengakses beragam layanan ekonomi, seperti simpan pinjam, pengadaan sembako, dan layanan kesehatan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. KDMP juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui koperasi, distribusi hasil pertanian dapat dilakukan secara lebih efisien, sehingga petani dapat memperoleh harga jual yang lebih baik, sementara konsumen pun bisa mendapatkan produk dengan harga yang lebih terjangkau. Di samping itu, permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat desa adalah ketergantungan pada rentenir yang mengenakan bunga tinggi. Dengan adanya unit simpan pinjam di koperasi, masyarakat memiliki alternatif pembiayaan yang lebih adil dan terjangkau, serta terhindar dari jeratan rentenir (Fahum, 2025).

Jika kita melihat kebijakan Pemerintah terkait penataan perekonomian desa, kurang lebih dua dekade sebelumnya Pemerintah telah membentuk BUMDes. Berdirinya BUMDes dilandasi oleh Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDes ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan pemodal besar.

Meskipun belum semua BUMDes dikelola secara optimal (Finka, 2025), namun faktanya BUMDes memiliki kapasitas untuk mengubah potensi desa menjadi sumber daya ekonomi yang signifikan. Salah satu peran kunci BUMDes adalah sebagai pengelola keuangan yang efisien dan dapat menyediakan modal awal melalui akad investasi skema bagi hasil, serta memastikan dana digunakan secara produktif untuk mendukung usaha lokal. Laporan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 50.000 BUMDes aktif di Indonesia telah berhasil meningkatkan pendapatan desa dan menciptakan lapangan kerja melalui pengelolaan usaha produktif seperti pertanian dan UMKM. Contohnya, “BUMDes Tirta Mandiri” di Desa Ponggok Klaten, menghasilkan pendapatan tahunan lebih dari Rp15 miliar melalui usaha wisata dan perikanan (Perdana, 2025).

Model Sinergi Bisnis KDMP dan BUMDes

Meskipun memiliki beberapa perbedaan, kedua entitas ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam memajukan ekonomi desa. Koperasi dapat menjadi mitra strategis BUMDes dalam mengembangkan usaha dan memperluas jaringan pemasaran. BUMDes juga dapat berperan strategis dalam pengembangan kewirausahaan, khususnya melalui pelatihan kewirausahaan. Dukungan BUMDes ini memperkuat koperasi sebagai wadah pemberdayaan usaha mandiri dan berkelanjutan, sekaligus mewujudkan ekosistem ekonomi desa yang kuat dan berdaya saing.

Beberapa model sinergi bisnis dapat dilakukan antara KDMP dengan BUMDes, seperti pola kerja sama dan bagi hasil. Model kerja sama dapat dilakukan dengan menyertakan modal BUMDes ke dalam KDMP. Dalam hal ini posisi BUMDes menjadi lebih strategis, yaitu sebagai *holding* lokal yang menanam saham di berbagai unit bisnis, termasuk koperasi. Dalam UU Cipta Kerja, model ini terbuka secara hukum (Imtihan, 2025). Dalam konteks KDMP, BUMDes dapat mengelola dana koperasi dengan cermat, serta memastikan stabilitas finansial dan keuntungan yang berkelanjutan (Perdana, 2025)

Dalam cakupan yang lebih luas, BUMDes dapat berperan sebagai mitra utama KDMP, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, pemasaran, pendidikan anggota, dan inovasi pendanaan. Dengan pendekatan ini, BUMDes tidak hanya mendukung operasional koperasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap elemen dalam ekosistem ekonomi desa berjalan selaras untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Kerja sama lainnya

yang dapat dilakukan BUMDes adalah menjadi fasilitator pemasaran yang memperluas jangkauan produk desa tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga membangun jaringan distribusi ke pasar yang lebih luas. Kerja sama di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan untuk anggota koperasi, seperti teknik pertanian modern, pengolahan hasil panen, atau keterampilan pemasaran digital.

BUMDes dapat mengambil peran penting dalam mengelola investasi melalui KDMP dengan memanfaatkan *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah, yang memungkinkan masyarakat berinvestasi di berbagai sektor seperti perikanan dan kerajinan. Dalam skema ini, BUMDes menyusun proposal, mengelola dana, dan memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana, sehingga investor memperoleh keuntungan serta koperasi mendapat tambahan modal tanpa beban bunga dan keuntungan investasi dibagikan sebagai Sisa Hasil Usaha koperasi untuk anggota. Pemerintah desa juga dapat memanfaatkan hasil tersebut untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas pendidikan, sebagaimana dicontohkan di Desa Ponggok yang berhasil mengelola aset Rp43 miliar untuk kepentingan masyarakat (Perdana, 2025).

Dalam sistem bagi hasil, BUMDes dapat memperoleh bagian sesuai dengan kontribusi nyata yang diberikan. Contohnya, jika BUMDes berhasil meningkatkan penjualan melalui upaya pemasaran, maka proporsi keuntungan yang diterima akan lebih besar, sehingga keadilan berdasarkan peran dapat terwujud. Dengan pengelolaan keuangan, pemasaran produk, pemberdayaan masyarakat, serta penggalangan dana secara inovatif, BUMDes berperan mendorong koperasi menjadi penggerak utama yang menjadikan desa sebagai pusat ekonomi mandiri.

Penutup

Pembentukan KDMP melengkapi kebijakan Pemerintah sebelumnya dalam upaya penguatan ekonomi desa melalui BUMDes yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan koperasi serta pemberdayaan ekonomi desa. Walaupun masih menghadapi tantangan manajemen dan keberlanjutan, BUMDes terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja di desa melalui pengelolaan usaha produktif. Secara keseluruhan, sinergi antara KDMP dan BUMDes melalui kerja sama yang saling menguntungkan, diharapkan mampu memperkuat sistem ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, mempercepat pengentasan kemiskinan, serta mendorong kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan secara berkelanjutan. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui beberapa skema, antara lain model kerja sama dan bagi hasil. Komisi VI DPR RI perlu mendorong Pemerintah agar KDMP dapat melakukan kerja sama yang tersinergi sehingga tujuan memperkuat perekonomian desa melalui potensi yang dimilikinya dapat terwujud.

Referensi

- Cahyadin, M. (2025, April 25). Sinergi bisnis Koperasi Merah Putih dan BUMDes. *Jawapos.com*. <https://radartulungagung.jawapos.com/kolom/765924836/sinergi-bisnis-koperasi-merah-putih-dan-bumdes>
- Fahum (2025). *Pengertian dan peran Koperasi Merah Putih yang diluncurkan Oktober 2025*. <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-dan-peran-koperasi-merah-putih-yang-diluncurkan-oktober-2025/>
- Finka, D. (2025, Juni 8). *Core Koperasi Merah Putih berpotensi tumpang tindih dengan BUMDes*. <https://www.kabarbursa.com/makro/core-koperasi-merah-putih-berpotensi-tumpang-tindih-dengan-bumdes>
- Imtihan. (2025, April 23). Di balik strategi baru menakar langkah dan peran pendamping desa dalam sinergi BUMDes dan Koperasi MP. *Kompasiana.com*. <https://www.kompasiana.com/imtihanberin3971/6806fc7434777c5766253202/di-balik-strategi-baru-menakar-langkah-dan-peran-pendamping-desa-dalam-sinergi-bumdes-dan-kopdes-mp?page=all>
- Merahputih.kop.id (t.t). *Tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. <https://merahputih.kop.id/>
- Perdana B.S. (2025, Maret 26). Sinergi Koperasi Merah Putih dan BUMDes menuju desa mandiri. *Antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/4737885/sinergi-koperasi-merah-putih-dan-bumdes-menuju-desa-mandiri>
- Permana, R.H. (2025 Juni). Pembentukan Kopdes Merah Putih di 80 ribu desa sudah capai target Presiden. *Detik.com*, <https://news.detik.com/berita/d-7968747/pembentukan-kopdes-merah-putih-di-80-ribu-desa-sudah-capai-target-presiden>
- Susanto, A (2025, April 30), *Dinamika ekonomi desa: Perbandingan Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes*. <https://atulintang.desa.id/berita/dinamika-ekonomi-desa-perbandingan-koperasi-desa-merah-putih-dan-bumdes>

